BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan bentuk laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*) sebagai bentuk *sustainability report* yang mencakup 3 elemen yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. *Sustainability report* mulai diterapkan pada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang *go public* untuk dapat mengukur, mengungkapkan dan menjadi perusahaan yang akuntabel. Pengungkapan *sustainability report* di kebanyakan negara, termasuk Indonesia yang masih bersifat sukarela, artinya tidak ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan *financial reporting* (Suryono dan Prastiwi, 2011). Laporan keberlanjutan yang bersifat sukarela adalah sebagai bentuk *sustainability report* dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder* dan masyarakat agar perusahaan mengetahui tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Salah satu tantangan pembangunan yang berkelanjutan adalah tuntutan dan pilihan akan cara berpikir baru serta inovatif. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang (*Commission on Environment and Development* (dalam GRI, 2006)). Globalisasi ekonomi telah membuka kesempatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini dapat dicapai melalui perdagangan, berbagi pengetahuan lewat informasi, maupun kelancaran dalam mengakses teknologi canggih. Namun, pertumbuhan positif dan peningkatkan mutu kualitas hidup ternyata diimbangi

dengan munculnya informasi yang mengkhawatirkan mengenai kondisi lingkungan yang kualitasnya semakin hari semakin memburuk (Suyono, 2011)

Sustainability report belakangan ini telah menjadi isu utama perusahaan sehingga tujuan perusahaan kini tidak hanya tertuju pada pencapaian keuntungan. Konsep tersebut muncul karena tuntutan dan harapan masyarakat tentang peran perusahaan dalam masyarakat (Nurrahman dan Sudarsono, 2013). Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas bisnis perusahaan memberitahu kta bahwa perusahaan-perusahaan yang tengah berkembang di Indonesia masih banyak yang kurang peduli akan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat aktivitas bisnisnya. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar *(environment)* adalah tanggungjawab sosial perusahaan yang belakangan ini semakin disoroti dengan tajam oleh berbagai kelompok kepentingan di masyarakat sehingga citra perusahaan akan dalam risiko jika direksi dan dewan komisaris tidak memperhatikan aspek ini dengan cermat (Daniri, 2014:61)

Sustainability Report (SR) merupakan gagasan bahwa perusahaan tidak cukup dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *single buttom line,* yaitu nilai perusahaan yang mefleksikan kondisi keuangan saja, tapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu selain masalah keuangan juga masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008), karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara keberlanjutan. Konsep SR merumuskan tujuan bisnis dengan 3P (*profit,*

peope, planet), laba tercapai, orang sejahtera dan menjamin keberlanjutan hidup planet (Pujiastuti, 2015)

Secara umum terutama di Indonesia, dalam pengungkapan *sustainability report* (SR) masih bersifat sukarela atau tidak wajib. Hingga akhir 2016 tercatat 120 perusahaan yang menerbitkan s*ustainability report* (SR). Laporan keberlanjutan ini sangat penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis bersama para pemangku kepentingan. Laporan sukarela tersebut disebut *sustainability report* (laporan keberlanjutan) apabila kinerja yang dilaporkannya dalam kurun waktu tertentu sudah menunjukkan kecenderungan membaik menuju dampak positif. Masyarakat luas bisa melihat aktivitas CSR perusahaan melalui *sustainability report* perusahaan itu sendiri.

Praktik dan pengungkapan *sustainability report* merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Selain itu, mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan *Sustainability Report* di Indonesia. Dengan adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya *adverse selection*

maupun *moral hazard,* dengan konsekuensi perusahaan yang tidak melaksanakan praktik dan pengungkapan *Sustainability Report* (Aziz, 2014)

Peraturan tersebut diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang memuat Pasal 74 ayat 1 yang menyatakan "Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usahanya di lapangan dan/ atau berhubungan dengan sumber daya alam berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Tetapi keberadaan pengungkapan sosial dan lingkungan ini beralasan tidak semua perusahaan di Indonesia mengungkapkan laporan keberlanjutan, tidak satupun definisi pelaporan keberlanjutan yang dapat diterima secara global, dan bagaimana seharusnya format laporan keberlanjutan itu sendiri sebagai alasan utama tidak setiap perusahaan mengungkapkan.

Alasan lain adalah bahwa manajer perusahaan memiliki tingkat inisiatif yang berbeda salam hal pengungkapan laporan keberlanjutan, serta pengaturan biaya inklusif mereka. Seperti negara berkembang lainnya, setiap negara memiliki aturan pengungkapan wajib dan sukarela sendiri. Berbagai peraturan mewajibkan perusahaan untuk membuat pengungkapan lingkungan, tetapi mengembangkan perusahaan yang masih memiliki komitmen rendah banyak perusahaan gagal menghubungkan strategi bisnis mereka dengan kinerja keuangan dan non-keuangan. Ini memicu munculnya masalah yang timbul dari kegiatan entitas, khususnya ditimbulkan dampak terhadap lingkungan. Para pemimpin dunia adalah semakin menyadari bahwa pengungkapan yang komprehensif (bukan hanya laporan keuangan) akan mendukung strategi

perusahaan. Itu juga dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. (Lucia dan Rosinta, 2018)

Contoh seperti kasus konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng. Warga Kendeng menolak pembangunan pabrik semen dan menggugat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atas penerbitan izin lingkungan kegiatan penambangan karst dan penambangan pabrik ke Mahkamah Agung (MA). Warga Kendeng mengatakan mereka tidak diberikan informasi mengenai pembangunan pabrik semen di wilayah desa mereka. Dokumen AMDAL juga tidak disampaikan kepada warga Kendeng, oleh karena itu dampak-dampak negatif akibat pembangunan pabrik semen tidak diketahui oleh masyarakat. Pembangunan pabrik semen ini juga menyalahgunakan peraturan yang sudah ada diantaranya, penggunaan kawasan cekungan air tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi. Kemudian penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Fakta di lapangan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda nomor 13 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Remabng Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar (kompasiana.com)

The Global Reporting Initiative (GRI) yang berlokasi di Belanda dan pemegang otoritas lain di dunia, berusaha mengembangkan *"framework for sustainability reporting"*, dan versi terakhir dari pedoman pelaporan yang telah dihasilkan dinamakan *G3 Guidelines* (Dilling, 2009). Semakin meningkatnya jumlah organisasi-organisasi maupun perusahaan-perusahaan global yang mengadopsi *G3 Guidelines.* Perusahaan-perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability report* berdasarkan *G3 Guidelines* disyaratkan memenuhi tipe-tipe standar pelaporan, yakni: profil organiaasi, indikator kinerja, dan pendekatan manajemen (GRI 2009B) dalam Khafid dan Mulyaningsih (2015)

Menurut Wijayana dan Kurniawati (2018), salah satu cara untuk mengetahui secara detail kegiatan tanggung jawab sosial apa saja yang telah dilakukan perusahaan, maka perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan tersebut di *sustainability report*. Saat ini pengungkapan *sustainability report* masih bersifat *voluntary*. Selain itu biaya serta waktu yang dikeluarkan untuk melakukan tanggung jawab sosial serta pembuatan pelaporannya tidaklah sedikit sehingga masih banyak perusahaan yang melakukan dan melaporkannya dengan seadanya saja. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong suatu perusahaan untuk mengungkapkan lebih luas mengenai kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan.

Menurut Aliniar dan Sri (2017), praktik dan pengungkapan *sustainability report* merupakan implementasi konsep dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang memiliki prinsip bahwa *stakeholder* memerlukan perhatian, baik dalam hal aturan yang ada serta menjalin kerjasama

yang aktif untuk kelangsungan hidup jangka panjang antara *stakeholder* dengan perusahaan. Adapun insfrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan *sustainability report* adalah mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan. Sehingga dapat mengurangi asimetri informasi, namun jika asimetri informasi ini terjadi dapat menyebabkan *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan praktik dan pengungkapan *sustainability report*.

Menurut Lucia dan Rosinta (2018), manajer perusahaan memiliki tingkat inisiatif yang berbeda dalam hal pengungkapan laporan keberlanjutan, serta pengaturan biaya inklusif mereka. Seperti negara berkembang lainnya, setiap negara memiliki aturan pengungkapan wajib dan sukarela sendiri. Berbagai peraturan mewajibkan perusahaan untuk membuat pengungkapan lingkungan, tetapi mengembangkan perusahaan yang masih memiliki komitmen rendah. Banyak perusahaan gagal menghubungkan strategi bisnis mereka dengan kinerja keuangan dan non-keuangan. Ini memicu munculnya masalah yang timbul dari kegiatan entitas, khususnya ditimbulkan dampak terhadap lingkungan. Para pemimpin dunia adalah semakin menyadari bahwa pengungkapan yang lebih komprehensif (bukan hanya laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Ini juga dapat menimbulkan komitmen mereka terhaap pembangunan berkelanjutan.

Menurut Afsari, Rimah dkk (2017), perusahaan mengungkapkan *sustainability report* untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan kepada *stakeholder*. Hal ini dapat meningkatkan citra

perusahaan dan membantu perusahaan untuk memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal perusahaan. ketika citra perusahaan dianggap baik, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan.

Menurut Khafid dan Mulyaningsih (2015), semua upaya difokuskan agar perusahaan dapat bertahan hidup dalam kondisi pasar dimana permintaan menurun dan biaya keuangan semakin tinggi. Oleh karena itu, *sustainability* sebuah perusahaan "tidak hanya" terbatas pada memperhatikan dampak dari operasi perusahaan terhaap lingkungan dan masyarakat. *Sustainability* harus menjadi bagian integral dari perencanaan jangka pendek dan perancangan strategi jangka panjang sebuah perusahaan. Krisis ekonomi global telah membuat masyarakat menjadi lebih curiga terhadap perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mengabaikan norma-norma sosial akan kehilangan niat baik dari para konsumen, pekerja dan pihak regulator.

Berdasarkan pernyataan di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, diantaranya adalah umur perusahaan; likuiditas diukur dengan *Current Ratio (CR); leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio (DER),* profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset (ROA);* ukuran perusahaan*; corporate governance* yang diukur dengan komite audit, dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, dan kepemilikan saham terkonsentrasi. Namun yang akan diteliti oleh penulis adalah

return on asset (ROA), current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, dan umur perusahaan.

Pemilihan sampel Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini karena perusahaan yang masuk dalam kriteria tercatat di BEI minimal 3 bulan, perusahaan dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler, memiliki kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan (www.sahamok.com). Maka dari itu perusahaan LQ 45 penting untuk melakukan pengungkapan *sustainability report* untuk melaporkan kegiatan keberlanjutan perusahaan. Karena dengan kriteria memiliki kondisi keuagan transaksi yang tinggi maka masyarakat, *stakeholder*, dan pihak internal perusahaan lainnya mengetahui prospek kelanjutan pada perusahaan tersebut. Selain itu, kita semua tahu bahwa belum semua perusahaan yang tergolong dalam kondisi keuangan tinggi sadar untuk melaporkan segala kegiatannya khususnya untuk mempublikasikan tingkat keberlanjutan perusahaan dalam *sustainability report*. Rendahnya pengungkapan *sustainability report* saat ini karena pengungkapannya bersifat sukarela. Hal ini disebabkan karena kurangnya antusias perusahaan untuk memahami tentang kepentingan dari peran lingkungan sosial dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Karakteristik perusahaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Adanya suatu perbedaan karakteristik perusahaan diduga dapat memberikan pengaruh juga terhadap pengungkapan *sustainability report*. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini

karakteristik perusahaan yang digunakan adalah *return on asset, current ratio, debt to equity ratio,* dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah *Return on Asset* yang mana merupakan kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia di dalam perusahaan. Kemampuan menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan asset yang tersedia di dalam perusahaan dianggap penting untuk diungkapkan kemana keuntungan tersebut diperuntukkan, baik untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan lainnya yang bisa menaikan citra perusahaan seperti kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan lebih detail kegiatan tanggung jawab sosialnya di *sustainability report*. Menurut penelitian Lucia dan Rosinta (2018), Wijayana dan Kurniawati (2018), Pujiastuti (2015), Khafid dan Mulyaningsih (2015), Gunawan (2015), dan Nasir, Azwir dkk (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan menurut penilitian Adhipradana dan Daljono (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report.*

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah *leverage* (*Debt to Equity Ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi. Menurut penelitian Lucia dan Rosinta (2018), Khafid dan Mulyaningsih (2015) dan Pujiastuti (2015) menyatakan bahwa

Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun berbeda dengan penelitian Gunawan (2015) dan Nasir, Azwir dkk (2014) yang menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report.*

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah likuiditas (*Current Ratio*) yang merupakan kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutang jangka pendeknya menggunakan aset jangka pendek. Rasio yang semakin tinggi menunjukkan tingkat likuiditas yang lebih besar (Rufaidah, 2012:30) Menurut penelitian Lucia dan Rosinta (2018) dan Adhipradana dan Daljono (2014) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report.* Namun berbeda dengan penelitian Gunawan (2015) yang menyatakan bahwa likuiditas (CR) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala peruahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Menurut penelitian dari Lucia dan Rosinta (2018), Wulanda (2017), Pujiastuti (2015), dan Khafid dan Mulyaningsih (2015) menunjukkan bahwa ukuran peusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report.* Tetapi berbeda dengan penelitian Aliniar dan Sri (2017) dan Nasir, Azwir dkk (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* antara lain tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) Menurut FCGI (Forum *Corporate Governance* Indonesia) tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan dan pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait dengan hak dan kewajiban. Tata kelola perusahaan yang baik akan selalu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan utama. Tujuan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menciptakan sistem kontrol perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan sehingga pertumbuhan perusahaan tercapai. Perusahaan yang memiliki pemerintahan yang baik tidak hanya menempatkan kepentingan pemegang saham tetapi juga pemangku kepentingan, ini menyiaratkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan dan laporan keberlanjutan memiliki prinsip yang sama yang bertanggung jawab untuk para pemangku kepentingan. Salah satu tujuan *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan sehingga dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan dalam *sustainability report*, karena perusahaan ingin menunjukkan kinerjanya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Pada penelitian ini tata kelola perusahaan meliputi variabel dewan direksi dan komite audit. Berbagai penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan *sustainability report*, masih banyak terdapat perbedaan hasil

penelitian antara peneliti satu dengan peneliti yang lain yang dijelaskan sebagai berikut.

Dewan direksi merupakan faktor kelima yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Dewan Direksi adalah pemimpin perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham. Menurut penelitian Lucia dan Rosinta (2018), Khafid dan Mulyaningsih (2015) dan Hasanah, Ni'matul dkk (2015) menujukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan penelitian Wulanda (2017) menyatakan bahwa dewan direksi mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report.*

Komite audit merupakan faktor keenam yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan sendiri oleh dewan komisaris untuk membantu pemeriksaan yang dianggap perlu dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Menurut penelitian Lucia dan Rosinta (2018), Aliniar dan Sri (2017), Wulanda (2017), Hasanah, Ni'matul dkk (2015), Khafid dan Mulyaningsih (2015), Nasir, Azwir dkk (2014) serta Adhipradana dan Daljono (2014) menunjukkan jika komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan menurut Afsari, Rimah dkk (2017) dalam penelitiannya menunjukkan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Umur perusahaan merupakan faktor ketujuh yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report.* Umur Perusahaan. Umur perusahaan adalah

lamanya perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Umur perusahaan menunjukkan kemampuan dalam keunggulan berkompetensi. Dengan demikian semakin lama perusahaan berdiri, perusahaan tersebut semakin dapat menunjukkan eksistensi dalam lingkungan dan semakin bisa meningkatkan kepercayaan investor. Menurut penelitian Wijayana dan Kurniawati (2018) dan Pujiastuti (2015) menunjukkan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report.* Hal ini disebabkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial tidak bergantung lama atau tidaknya perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia tetapi lebih kepada bagaimana mendapatkan nilai/citra yang baik di mata investor dan masyarakat. Berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang pengungkapan *sustainability report* pada berbagai banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih terdapat perbedaan hasil.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan *sustainability report.* Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lucia dan Rosinta Ria Panggabean (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen umur perusahaan, umur perusahaan menjadi faktor yang cukup penting dalam menganalisis laporan tahunan dan *sustainability report.* Alasan ditambahkan variabel umur perusahaan karena dapat menunjukkan eksistensinya sampai mana dapat menghasilkan *return* bagi keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, populasi yang digunakan adalah

Perusahaan LQ 45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. Selain itu data yang digunakan adalah *annual report* tahun 2013-2017, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2013-2015.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINANBILITY REPORT* (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)"**.

1.2 Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang di atas agar pokok permasalahan lebih terfokus maka ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Populasi dan sampel yang digunakan adalah Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan dan diambil dari Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi dari perusahaan terkait.
3. Periode penelitian dibatasi pada *annual report* tahun 2013-2017.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Variabel Independen: *Return on Asset, Current Ratio, Debt to Equity Ratio,* Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Umur Perusahaan.

b. Variabel Dependen: Pengungkapan *Sustainability Report.*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dijawab melalui penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah *current ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
7. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *return on asset* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report.*
2. Untuk mengetahui apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report.*
3. Untuk mengetahui apakah *current ratio* berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report.*
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report.*
5. Untuk mengetahui apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report.*
6. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report.*
7. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report.*

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi pemahaman tentang *sustainability reporting*, pengembangan ilmu pengetahuan *sustainability*

report yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan, *Good Corporate Governance*, dan Umur Perusahaan pada perusahaan yang ada di Indonesia terutama penilitian yang berfokus pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Menjadikan sumber informasi yang menunjang atau dapat mempengaruhi reputasi perusahaan yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pelaporan laporan keberlanjutan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi yang memberikan informasi keterkaitannya dengan kelangsungan hidup pelaporan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk berinvestasi.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan penilaian pemerintah terhadap berbagai perusahaan juga bahan penilaian terhadap para pemangku jabatan perusahaan terkait. Dan juga bahan pertimbangan untuk mengatur mekanisme peraturan pelaporan *sustainability report* perusahaan BUMN maupun terbuka di Indonesia.